

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN
PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Guna Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Untuk Mendapatkan Gelar sarjana

Oleh :

MUSLIM

08.851.0003

Program Studi Ilmu Pemerintahan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2012

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : UPAYA PEMERINTAH DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI
KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN
ROKAN HILIR

Nama Mahasiswa : MUSLIM

No. Stambuk : 08 851 0003

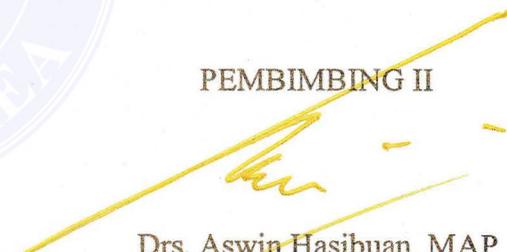
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I


Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP

PEMBIMBING II


Drs. Aswin Hasibuan, MAP



DEKAN


DRS. H. IRWAN NASUTION, SPd, MAP

ABSTRAK

Meningkatkan perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah, dan sebagai stabilizer merupakan upaya pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil analisis data hipotesis yang diajukan dan interpretasi atas hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat tidak semudah seperti membalik telapak tangan melainkan harus melalui proses panjang dan berliku serta akan menghabiskan banyak waktu juga tenaga, dan tampaknya harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda.

Sikap pemerintah daerah dalam memimpin daerahnya baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan. Namun kecenderungan yang terjadi selama ini, pola kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini jelas terlihat bahwa kebanyakan dari masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir khususnya mereka yang masih berusia produktif banyak keluar daerah mencari penghidupan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini menandakan bahwa daerah Pasir Limau Kapas tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi ini diperparah lagi tidak adanya investor yang menanamkan modal sehingga geliat pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan system agribisnis, industri kecil, dan kerajinan rakyat, sangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Hal ini terlihat bahwa dengan adanya upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi.

Kata kunci : Pemerintah, pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan, masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh menurut beberapa pendapat masyarakat :

1. Khadijah : Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya yang dilakukan sampai sekarang ini ditandai dengan peningkatan mutu melalui pembangunan dalam bidang pendidikan, namun belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak kekurangan-kekurangan dan keluhan dari instansi sekolah, seperti kurangnya fasilitas-fasilitas sekolah dalam bidang sarana dan prasarana. Sehingga mutu pendidikan di Kecamatan Pasir Limau Kapas masih dikatakan kurang. Tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan ini juga masih kurang diperhatikan oleh pemerintah
2. Prasetyo : Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasir Limau Kapas sangat lamban, karena pemerintah tidak langsung turun tangan melihat ke lapangan. Petugas bawahannya saja yang datang untuk menjalankan tugasnya. Sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki aturan.
3. Baharjo : Upaya pemerintah masih kurang dalam hal memperkuat dan meningkatkan fungsi lembaga pemerintahan desa dan kelembagaan sosial masyarakat yang ada di desa, hendaknya upaya pemerintah tersebut ditunjukkan melalui pelatihan dan pendampingan, baik itu lembaga adat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainya yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Fatmawatih : Upaya pemerintah dalam mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan memang sudah berjalan, akan tetapi masih banyak yang belum terlaksana sepenuhnya. Dapat dilihat dari anggota masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, karena tidak adanya lowongan pekerjaan yang tersedia. Semoga pemerintah dapat memberikan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Subagiyo : Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan melalui kegiatan pelatihan paket usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin terutama kepala keluarga, perempuan, pemberian paket bantuan usaha dan pendampingan sudah diterapkan oleh pemerintah. Namun disektor lain masih banyak yang belum diperhatikan pemerintah

diantaranya : belum berkembangnya tingkat perekonomian masyarakat, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, terbatasnya sarana-prasarana kesehatan, belum memadainya sarana infrastruktur transportasi, kurang memadainya sarana-prasarana Air bersih, belum tersedianya sarana penerangan listrik, dan kondisi keamanan relatif masih rentan dan rawan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tani-nelayan di desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat juga kurang diperhatikan.



KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Upaya Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir”**.

Dalam merampungkan tugas akhir ini, penulis banyak menghadapi hambatan baik dari segi teknis, waktu, tenaga, serta biaya. Namun dengan petunjuk Rahmat dari Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana adanya.

Dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan selaku Pembimbing I penulis.
2. Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus pembimbing II penulis.
3. Bapak M. Nasir, SPd Selaku Camat di Kecamatan Pasir Limau Kapas dimana penulis melakukan penelitian.

4. Bapak M. Sidik, S.Ag Selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Pasir Limau Kapas yang telah banyak mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas medan Area.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman perkuliahan di Universitas Medan Area.

Akhir kata penulis memanjatkan doa dan sujud kepada Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Agar senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan serta rahmatnya kepada kita, Amin ya Rabbal' Alamin.

Medan, Mei 2012

Penulis

Muslim

NPM : 08 851 0003

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Hipotesis	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	8
B. Fungsi Pemerintah	11
C. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	19
D. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.....	21
E. Upaya Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat	
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan	24

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	31
A. Populasi dan Sampel	31
B. Metode Pengumpulan Data	31
C. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	32
D. Metode Analisis Data	33
BAB IV. DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN.....	34
A. Sejarah Singkat Kecamatan Pasir Limau Kapas.....	34
B. Geografi Kecamatan Pasir Limau Kapas.....	35
C. Demografi kecamatan Pasir Limau Kapas.....	36
D. Potensi Kecamatan Pasir Limau Kapas.....	36
E. Keadaan Ekonomi.....	41
F. Struktur Organisasi.....	42
G. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pasir Limau Kapas.....	51
BAB V. UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.....	53
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas.....	35
Tabel 2 Jumlah Penduduk Demografi kecamatan Pasir Limau Kapas.....	35
Tabel 3 Produksi Perikanan Tahun 2012imau Kapas.....	37
Tabel 4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan	38
Tabel 5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur.....	39
Tabel 6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
Tabel 7 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama/ Keyakinan	40
Tabel 8 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok/Organisasi Masyarakat.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi desentralisasi di daerah otonomi kini tidak sepenuhnya bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat perda, tindakan eksploitatif terhadap segala sumber daya yang ada demi mendongkrak pendapatan asli daerah. Ketimpangan antar daerah berdasarkan polarisasi kaya-miskin, kini sedikit banyaknya mulai memiliki perencanaan yang inovatif dan tentunya reformis

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menganut desentralisasi seperti yang di amanatkan UU. No. 32 tahun 2004 (Revisi dari UU No. 22 tahun 1999) memang ada celah ruang dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan mendasar dengan lebih mendekatkan pemerintah (jangkauan pelayanan public) kepada masyarakat, sehingga peran pemerintah sebagai pelayanan public semakin terasa, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Penegasan otonomi daerah tergantung dari sejauh mana upaya pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dalam arti lain masyarakat diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangga desanya sehingga bisa mandiri sesuai dengan potensi dan sumberdaya yang ada. Seluruh sumberdaya yang ada (alam dan manusia) harus

dioptimalkan sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai.

Kabupaten/ Kota di Indonesia yang berinovasi serta melaksanakan reformasi birokrasi dalam pemerintah daerahnya, bisa menjadi bukti bahwa otonomi daerah memiliki dampak positif dalam skala lokal dan Nasional. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan sekarang ini. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota, terbukti telah membawa perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga di pedesaan.

Suhardi (2003;1) mengemukakan bahwa, “keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian penyusunan program program pembangunan perlu diyakini oleh aparatur pemerintah daerah sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat”

Selanjutnya keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparatur yang secara fungsional menangani proses-proses penyusunan program kebijakan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan. Kemudian yang terpenting dan juga yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkannya dalam usaha nyata. Upaya-upaya tersebut tidak semudah seperti membalik telapak tangan melainkan harus melalui proses panjang dan berliku serta akan menghabiskan banyak waktu juga tenaga, dan tampaknya harus

dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda.

Sikap pemerintah daerah dalam memimpin daerahnya baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memegang peran penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan.

Namun kecenderungan yang terjadi selama ini, pola kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini jelas terlihat bahwa kebanyakan dari masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir khususnya mereka yang masih berusia produktif banyak keluar daerah mencari penghidupan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini menandakan bahwa daerah Pasir Limau Kapas tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kondisi ini diperparah lagi tidak adanya investor yang menanamkan modal sehingga geliat pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban.

Untuk itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR”**.

B. Perumusan Masalah

Menurut Mohammad Hatta (2000:4) “Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya. Kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam.

Permasalahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tentu memiliki banyak aspek penghalangnya, salah satu diantaranya adalah: untuk peningkatan ekonomi, terhalang dengan kurangnya minat investor untuk menanamkan modal serta keterbatasan sumber daya alam. Peningkatan kualitas kesehatan terhalang dengan keterbatasan dana, dan penyebaran penduduk yang tidak merata ditambah lagi jumlah petugas dan sarana kesehatan yang sangat minim. Kekakuan pemerintah tanpa melibatkan pihak ketiga/masyarakat juga merupakan penghalang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: “Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat masih dirasakan kurang dalam melakukan fungsinya sehingga peningkatan kesejahteraan tidak terpenuhi di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir”.

C. Pembatasan Masalah

Menurut Suhardi (2003;1), suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari soal-soal yang telah diketahui sebagian sedang, yang

sebagian lagi belum diketahui, atau belum diketahui sepenuhnya kelompok soal-soal mana yang menuntut supaya cepat diselesaikan.

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu dibuat suatu pembatasan masalah. Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.
2. Ruang lingkup penelitian ini adalah pada Kantor Camat Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.
3. Tahun penelitian ini adalah masa kerja tahun 2011 s/d 2012.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memberdayakan masyarakat khususnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menghadapi permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pasir Limau Kapas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu pemerintahan.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengenai pemberdayaan masyarakat, dan mengatasi kendala yang ada.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan solusi pemecahan masalah jika seandainya ada kendala yang dihadapi pemerintah, dan juga memotivasi masyarakat.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis maupun pembaca yang berminat untuk memperbaiki kekurangan di dalam instansi pemerintahan dimasa lalu.

E. Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah (Pemda) terkesan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan dan menerapkan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah seolah diimplementasikan sebagai keleluasaan bagi Pemda untuk membuat kebijakan yang menguntungkan daerahnya dengan sasaran peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus memikirkan ekonomi/kesejahteraan rakyatnya.

Sehingga kesan yang muncul adanya “pemimpin-pemimpin” kecil didaerah sebagai penguasa absolute. Kondisi ini jelas terlihat ketika menyangkut koordinasi antar pemerintah daerah, yang merupakan disharmonisasi hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan sendiri-sendiri dengan tidak lagi patuh pada provinsi, karena ia beranggapan bahwa bukan lagi bawahan dari Gubernur.

Padahal otonomi daerah adalah upaya untuk memberikan kewenangan pada Pemda supaya mengatur organisasi perangkat daerahnya, serta memberdayakan potensi daerah termasuk ekonomi, hal itu tidak hanya berarti materi, karena didalamnya ada juga keharusan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat. Wirawan, dkk, (2001 ; 152)

Dengan mendengar aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam berbagai aspek pembangunan, diharapkan semangat kebersamaan akan tercipta, yang pada puncaknya kesejahteraan dan ketenteraman akan tercapai.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dianggap benar namun perlu pembuktiannya. Winarno Surakhmad (2000; 73) mengatakan “ Hipotesis adalah jawaban dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar”. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1980;70) “Hipotesis masih berisi jawaban yang bersifat sementara dari suatu kegiatan penelitian”.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang merupakan hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Jika Upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat diberbagai aspek program di daerahnya dilakukan sesuai garis pelaksanaan tugas maka kesejahteraan akan tercapai”.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, *Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Daerah*, Kanisus Yogyakarta, 1999
- Carizon dan macaeuley, *Pemberdayaan Masyarakat*, Allkhlhas Surabaya, 1995
- Dwi Ningsih, Retno, *Sistem Pemerintahan*, Paradnya Paramita Jakarta, 1992
- Effendi, *Kepemimpinan Kepala Daerah Di era Otonomi*, Angkasa Bandung, 2006
- Erickson B.H dan T.A Nosamsuck, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, Lp3s, Jakarta, 1981
- Hatta, Mohammad, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara Jakarta, 2000
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, 1980
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bina Aksara Jakarta, 2002.
- Poelje, Van, *Pengembangan Kelembagaan*, alih bahasa, Pandan Guritno Jakarta, 1996
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penebar Swadaya Jakarta, 1996
- Rasdjid, *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Suatu Negara*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001
- RA. Suhardi, *Politik Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP Jakarta 2003
- Riza Risyanti, dan H. Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Salemba Empat Jakarta, 1998
- Sairin, Sjafrin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Pustaka Pelajar Yogyakarta 2002
- Soewargono dan Djohan, *Organisasi Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1996
- Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung 1986
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito Bandung, 2000

Volenhoven, Van, *Organisasi Pemerintahan*, alih bahasa Muhmmad Syamsi,
Bulan Bintang Jakarta 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 23. Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kecamatan Pasir Limau Kapas di Kabupaten
Rokan Hilir.

